

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koalisi partai politik merupakan aliansi atau perkumpulan dua atau lebih partai politik untuk mencapai tujuan bersama, biasanya koalisi partai politik dilakukan saat berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Koalisi partai politik sudah menjadi hal yang lumrah dalam konteks negara demokrasi yang memiliki dua atau lebih jumlah partai politik (sistem multipartai). Dalam proses pembentukan koalisi merupakan penggabungan berbagai dua unit atau lebih sumberdaya partai politik, yang pada akhirnya terbentuklah suatu formasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam meraih kekuasaan (Addiansyah, 2019).

Selama proses pembentukan koalisi terdapat dinamika dalam menentukan tujuan akhir koalisi. Pada dasarnya politik itu bersifat dinamis, karena didalamnya terdiri dari partai politik yang dilatarbelakangi berbagai macam ideologi dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam proses dinamika koalisi didalamnya terdapat perubahan, interaksi, dan strategi dari setiap aliansi partai politik. Dinamika koalisi yang berlangsung menunjukkan kompleksitas partai politik dalam membangun kerjasama, ditandai dengan adanya negosiasi kursi parlemen dan pertukaran kepentingan partai (Siti, 2022). Akhirnya persaingan partai politik dalam berkoalisi sangatlah dinamis bergantung pada strategi yang dipilih untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan.

Negara demokrasi dengan sistem multipartai dalam perjalanannya mengalami kondisi yang sangat kompleks, yaitu dengan membentuk kelompok yang terdiri dari banyak partai atau disebut koalisi. Untuk mencapai ambang batas presidential threshold 20% selisih kursi atau 25% suara sah nasional (Wibowo, 2022). Dilanjutkan pada tahun 2025 telah di sahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ambang batas tersebut telah di hapus menjadi 0% atau semua pihak dapat mengajukan calonnya. Namun tetap setiap partai harus membangun koalisi dan

kerjasama. Dalam berkoalisi partai politik juga dapat menyatukan arah dan visi-misi melalui koalisi yang terbangun (Gunanto et al., 2024).

Sebagai contoh pada pemilu 2024 lalu terdapat berbagai koalisi **Pertama** terdiri dari partai PKS, Nasdem, PKB dan Partai Ummat dengan mengusung calon presiden Anies Baswedan nomor urut 01. **Kedua** terdiri dari partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, PBB, PSI dan Garuda dengan mengusung Prabowo Subianto nomor urut 02. **Ketiga** terdiri dari PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo dengan mengusung Ganjar Pranowo nomor urut 03.

Gambar 1.1 Daftar Koalisi Pilpres 2024



Sumber : Mili.id

Seiring waktu, pola koalisi dalam pemerintahan memiliki beberapa manfaat dan pertimbangan. Pertama, koalisi dapat mempromosikan keberagaman dan inklusivitas sehingga aspirasi yang berbeda dapat terwakili. Kedua, proses negosiasi dan kompromi dalam pembuatan kebijakan memungkinkan tercapainya consensus bersama yang menghasilkan kebijakan moderat. Selain itu, koalisi membantu

menangani kompleksitas masalah Masyarakat yang beragam melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan berbagai perspektif (Saleh, 2008).

Setiap partai melakukan rekrutmen politik pada anggota untuk melakukan seleksi, pendidikan, distribusi anggota dengan ketat. Kemudian partai politik dapat melahirkan wakil-wakil rakyat di parlemen (Natalia, 2015). Tentu melalui rekrutmen partai dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang kemudian ingin mencalonkan dirinya menjadi legislative ataupun eksekutif.

Partai Keadilan Sejahtera yang selanjutnya disingkat (PKS), Mulanya pada 1998 muncul dari Partai keadilan (PK) yang dipelopori oleh Muhammad Natsir mantan perdana Menteri pada saat itu dan *Jamaah Tarbiyah* yang mengisi ruang dakwah dan rohis lingkup kampus. Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004 mendapat suara sebesar 7,3 % (Pro-Pemerintah), pada pemilu 2009 mengalami peningkatan 7,9 % (Pro-Pemerintah), namun pada 2014 mengalami penurunan sebesar 6,8 % (oposisi), selanjutnya 2019 ada peningkatan walaupun masih pada oposisi sebesar 8,21 % dan pada 2024 terakhir sebesar 8,42 %. PKS berhasil memberikan pola citra politik yang bersih dan bebas dari korupsi (Aminuddin, 2010).

Selain elektabilitas partai, simbol dan logo adalah suatu hal yang krusial bagi partai politik. Simbol dan logo partai menjadi bahan kajian dan evaluasi petugas partai untuk melihat daya tarik yang massif untuk pasarnya. Kemudian PKS merubah imagenya sebagai pembaharuan citra partai yaitu melalui logonya. Berikut adalah perubahan logo PKS dari tahun 1998-2024.

Gambar 1.2 Perubahan logo PKS



Sumber : Diolah oleh peneliti

Elektabilitas partai, ditandai dengan massa dan perolehan kursi parlemen. Massa di dapat melalui kampanye dan program partai terhadap masyarakat. Pada beberapa daerah tertentu partai politik menyebarkan pahamnya yang bertujuan untuk menyebarkan citra politik dan menyatukan pemikiran dengan Masyarakat dari Tingkat nasional/pusat sampai ke cabang/daerah, serta mengumpulkan aspirasi Masyarakat.

Pada 2019 Indonesia dilanda wabah covid-19 yang menyebabkan agenda pemilu serentak terhambat, pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan waktu penyelenggaraan prosesi pemilu, dikarenakan saat itu sedang diberlakukan program *social distancing* untuk meminimalisir penyebaran wabah yang semakin masif. Terhitung sejak bulan Oktober 2020 Tercatat kasus warga Kota Depok yang terjangkit covid-19 sudah sebanyak 2.990 kasus dengan 856 pasien positif covid-19 dengan presentase pelonjakan kasus sebanyak 500 persen sejak 2 bulan sebelum dilaksanakannya pilkada, sehingga Kota Depok saat itu ada pada kategori wilayah yang terjangkit covid-19 cukup tinggi (zona merah). Akhirnya KPUD Kota Depok memutuskan pelaksanaan pilkada Kota Depok diselenggarakan pada 9 desember 2020 (Rahmawati et al., 2022).

Elektabilitas PKS di Jawa Barat tergolong besar dengan perolehan suara sebanyak 3,29 juta. Tahun 2005-2024, PKS di Kota Depok telah menduduki kekuasaannya selama 20 tahun. Berikut merupakan hasil pemilihan waliKota Depok yang diusung oleh PKS selama 20 tahun.

Tabel 1.1 Hasil Pemilihan WaliKota Depok 2005 - 2024

No	Nama WaliKota/Wakil	Tahun Pilwalkot	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Present ase
1.	Nur Mahmudi Ismail- Yuyun Wirasaputra	2004	PKS	232.610	43,9%
2.	Nur Mahmudi Ismail- Mohammad Idris	2009	PKS	227.744	61,87%
3.	Mohammad Idris - Pradi Supriatna	2014	PKS, Gerindra, Demokrat, PBB (Koalisi Pelangi)	411.367	61.91%
4.	Muhammad Idris – Imam Budi Hartono	2020 (Covid-19)	PKS, Demokrat, PPP, (Koalisi Tertata Adil)	415.657	55,54%
4.	Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A Rafiq	2024	PKS, Golkar, Nasdem	396,863	46,76%

Sumber : KPU Kota Depok 2019-2020

Table di atas menyebutkan pada pilkada 2020 PKS berkoalisi dengan PAN, Demokrat, PKB, PPP dan Golkar. Dengan jumlah partai yang bergabung dalam mengusung Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono cukup untuk memenangkan kontestasi.

Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang telah diselenggarakan pada 27 November 2024. PKS mengusung kembali Imam Budi Hartono sebagai calon waliKota, sebelumnya beliau selaku wakil waliKota Kota Depok, dipasang dengan calon dari Partai Golongan Karya (Golkar) Ririn Farabi Arafiq sebagai wakilnya.

Menariknya pada pilkada 2024 Golkar kembali bekerja sama dengan PKS yaitu melalui pendekatan program dan visi yang sama. Akan tetapi pada kontestasi kali ini koalisi PKS dan Golkar mengalami kekalahan dengan memperoleh suara 46,76% dari Koalisi Gerindra Supian Suri.

Maka dari itu peneliti tertarik dengan PKS di Kota Depok, karena terhitung sejak 2004-2020 koalisi PKS diasumsikan banyak pertimbangan yang berdampak pada hasil pilkada. PKS berhasil menjaga dan meningkatkan elektabilitas partai melalui programnya dengan corak partai islam, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PKS menjadi pilihan untuk memimpin Kota Depok. Namun pada Pilkada 2024 Koalisi PKS mengalami hasil yang berbeda dan tidak lagi menjabat sebagai waliKota Depok. hal ini menjadi menarik dikarenakan Golkar pada Pilkada 2019 masih dengan komposisi partai yang sama yaitu Golkar dan PKS, lantas apakah ada perubahan haluan dukungan Masyarakat Depok atau Koalisi yang terbangun terdapat dinamika didalamnya.

Melihat dinamika koalisi PKS di Kota Depok, peneliti ingin menganalisis bagaimana pertimbangan PKS dalam pembentukan koalisi. melihat PKS di Kota Depok dengan koalisinya, apakah selama 5 tahun kebelakang pertimbangan PKS dalam menentukan rekan koalisinya di Kota Depok sudah dinilai efektif atau hanya memperpanjang kekuasaan PKS saja. Oleh sebab itu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **Dinamika Koalisi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Kepala Daerah 2019 & 2024 Kota Depok)**” yang memiliki tujuan untuk menganalisis peta koalisi PKS dalam perhelatan Pilkada, dan dapat membantu dalam memahami bagaimana PKS dalam menentukan arah koalisi atas dasar program dan ideologi partai atau sekedar pragmatisme saja.

B. Rumusan Masalah

Setiap partai politik membutuhkan koalisi dalam mengukung kandidat kepala daerah berdasarkan ideologis, namun banyak koalisi yang dibangun berdasarkan non. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembentukan koalisi PKS pada Pilkada Kota Depok 2020 dan 2024?
2. Bagaimana faktor pertimbangan pembentukan koalisi PKS pada Pilkada Kota Depok 2020 dan 2024?
3. Bagaimana dampak dinamika koalisi terhadap model koalisi PKS pada Pilkada 2020 dan 2024 di Kota Depok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan proses pembentukan koalisi PKS pada Pilkada Kota Depok 2020 dan 2024.
2. Menggambarkan faktor pertimbangan pembentukan Koalisi PKS pada Pilkada Kota Depok 2020 dan 2024.
3. Menggambarkan dampak dinamika koalisi terhadap model koalisi PKS pada Pilkada 2020 dan 2024 di Kota Depok.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat megembangkan studi ilmu politik dengan topik partai politik dan pilkada dan dapat bermanfaat bagi kegunaan secara akademis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

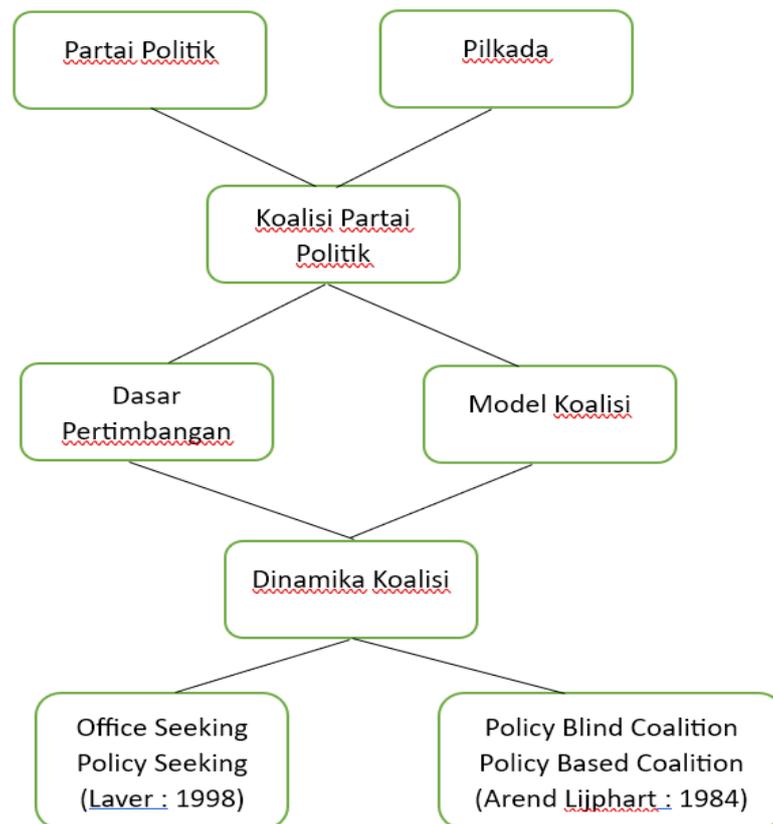
Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu politik yang berfokus pada topik Partai Politik dan koalisi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan dan perbaikan partai politik dalam pemilihan kepala daerah ini yaitu dapat menjadi bahan analisis koalisi yang terbangun ketika Pilkada serentak berlangsung, menjadi bahan pertimbangan PKS dalam menentukan koalisi kedepannya.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berdasarkan dasar pemikiran sebagaimana gambar dibawah ini berikut :



Gambar 1 : Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas Penelitian ini berfokus pada analisis koalisi partai politik dengan mempertimbangkan dua pendekatan utama, yaitu *officeseeking* dan *policyseeking* (Laver,1998). *Officeseeking* menekankan pada tujuan partai politik untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan,

sedangkan *policy seeking* berfokus pada pencapaian kebijakan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada klasifikasi koalisi oleh Arend Lijphart (1984), yaitu *policy blind coalition* yang tidak mempertimbangkan kesamaan ideologi dan *policy based coalition* yang dibangun berdasarkan kesamaan agenda kebijakan. Kedua model ini menjadi dasar untuk memahami dinamika pembentukan koalisi partai politik.

Dinamika koalisi partai politik dipengaruhi oleh interaksi antara tujuan pragmatis (*office seeking*) dan idealis (*policy seeking*). Faktor-faktor seperti kepentingan elektoral, kesamaan ideologi, dan konteks politik menjadi variabel yang memengaruhi stabilitas koalisi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kedua model koalisi (*policy blind* dan *policy based*) diterapkan dalam konteks sistem politik tertentu, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini memberikan landasan teoritis untuk mengkaji pola dan motivasi di balik pembentukan koalisi partai politik.